

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Fikri Hadin, 2013, Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Era Otonomi Daerah, Genta Press, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Chaerudin dan Syaiful Ahmad Dinar, 2008, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika Editama, Bandung.
- Jimly Asshidiqie, 2006, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM, Konstitusi Press dan PT. Syaamil Cipta Media, Jakarta.
- Josep Riwu Kaho, 1982, Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta.
- Prayudi, 1981, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Putranto, L. S., 2008, Rekayasa Lalu Lintas. Cetakan Pertama, PT Mancanan Jaya Cemerlang, Jakarta.
- Saiful Anwar, 2004, Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara, Glora Madani Press, Depok.
- Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.
- , 1983, Pengantar Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 1996, Sosiologi Suatu pengantar, Rajawali Pers, Bandung.
- , 2005, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers.
- Subekti, 1983, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung.
- , 2014, Metode Penelitian Manajemen, cetakan kedua, CV. Alfabeta, Bandung.
- Sujanto, 1986, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Edisi Revisi, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Victor M. Situmorang dan Yusuf Juhir, 1993, Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, Rineka Cipta,

Jakarta.

W. Riawan Tjandra, 2009, Hukum Keuangan Negara, PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta.

W.J.S. Poerwadarminta. 1984. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Jurnal

Andrea R. Sumampow, "Penegakan Hukum dalam Mewujudkan Ketaatan Berlalu Lintas", Jurnal Lex Crimen, Vol. 2, No. 7, November 2013.

Dewa Gede Atmadja, Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum, Kertha Wicaksana, Vol. 2, No. 2, 2018

Herma Yanti, "Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004", Jurnal Lex Specialis, Vol. 2, No. 11, Juni 2010.

Ramly O. Sasambe, "Kajian Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas oleh Kepolisian", Jurnal Lex Crimen, Vol. 5, No. 1, Januari 2016.

Samsul Bahri & Vitria Elsandiy, "Efektivitas Penerapan Belok Kiri Langsung (Studi Kasus Jalan Soeprpto Kota Bengkulu)", Jurnal Inersia, Vol. 5, No. 1, April 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan.

Lain-Lain

Buku Hanjar, 2011, Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas, Pusdik Lantas Serpong Lemdiklat Polri.

Deka Agastya Laktama, 2016, "Tinjauan Terhadap Penegakan Hukum

Perkara Pelanggaran Pasal 112 Ayat (3) Tentang Aturan Belok Kiri Ikuti Isyarat Lampu Lalu Lintas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Wilayah Hukum Kota Malang)”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

Dimas Hanan Sasmita, 2011, “Pelaksanaan Ketentuan Pengecualian Larangan Belok Kiri Langsung Dalam Pasal 112 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Wilayah Jakarta Barat”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta.

Wawancara

Ali, Wawancara, Masyarakat, Makassar 19 Agustus 2022.

Angga, Wawancara, Masyarakat, Makassar, 20 Agustus 2022

Asdar, Wawancara, Masyarakat, Makassar, 21 Agustus 2022

Dinul, Wawancara, Masyarakat, Makassar 19 Agustus 2022.

Samuel To Langan, Wawancara, Polrestabes Makassar, Makassar, 16 Agustus 2022

Syahril, Wawancara, Dinas Perhubungan Kota Makassar, Makassar.

Yusril, Wawancara, Masyarakat, Makassar, 20 Agustus 2022